

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pimpinan kecamatan dari sudut pandang etika politik Ibnu Taimiyah, yang berusaha melaksanakan amanat negara sedapat mungkin menurut hukum dan etika politik Ibnu Taimiyah. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang diuraikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Tumpangkrasak menggunakan kepemimpinan yang demokratis, Kepala Desa mencerminkan seorang pemimpin yang amanah dan adil, serta selalu melibatkan staf Tumpangkrasak. Otoritas dalam semua keputusan karena perannya dalam menentukan keberhasilan, kinerja dan tujuan organisasi dianggap sangat penting. Kepala Desa Tumpangkrasak juga dinilai telah memberikan contoh yang baik dan dapat menjadi motivasi bagi para pegawainya. Kepemimpinannya juga sangat bermanfaat bagi rakyatnya karena menghasilkan kebijakan yang berdampak baik bagi masyarakat. Misalnya, sistem pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat, dan pelaksanaan program bantuan pemerintah bagi yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di kantor balai desa Tumpangkrasak mengenai empat gagasan Ibnu Taimiyah tentang pengangkatan kepala negara terbaik, terlihat bahwa kepala desa yang diangkat sependapat dengan keempat pandangan tersebut dalam Pasal 33 UUD. No 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Desa. Kades dinilai lebih mumpuni dan berkompeten dalam jabatan tersebut, dan selama tiga tahun menjadi kades telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang sangat baik. Kepala desa dihadirkan sebagai panutan sebagai sosok yang lebih fungsional, jujur, adil dan pemimpin yang selalu mengutamakan kerjasama untuk mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi di Kantor Balai Kota Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kudus.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian etika politik Islam tidak hanya dari pejabat sebagai pemimpin tetapi juga dari orang yang memiliki amanah dalam pemerintahan.
2. Dapat menjadi informasi bagi calon pemimpin untuk menerapkan etika politik Islam dalam menetapkan kebijakan dan menunaikan tugas dan tanggung jawab di masa mendatang.
3. Diasrankan untuk masyarakat harusnya dapat memilih pemimpin yang memiliki sikap dan integritas yang baik. Pemimpin yang baik dapat dilihat dari moral dan etika dalam bermasyarakat.

